

Implementasi Mandat International Whaling Commission (IWC) dalam Kasus Perlakuan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang

Merryn Ester Augina – 071112009

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The major aim of this research is to identify how Japan as a nations-state may Influence the implementation of the International Whalling Commision's (IWC) mandate in the case of mistreatments of dolphins in Taiji, Japan. In more details, through neorealism perspectives this research found that there are 2 variables that gives influence structurally; (1) power orientation in organization (How the power in organization is oriented), (2) organization design. Meanwhile, every year in Taiji, Japan, hundreds of dolphins are herded into coves, captured by inhumane hunts, and killed. The hunt also threatens populations of these dolphins. In this case IWC acts differently compared to other cases of small cetaceans protection. IWC cannot stop Taiji's inhumane dolphin hunts despite international pressures that want them to end this annual hunt.

Keywords: *IWC, Neorealism, IWC's Mandate, Mistreatment of Dolphins in Taiji, Japan, Power Orientation, Organization Design, International Organization, Small Cetaceans, Japan.*

Penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh Jepang dan mandat IWC dalam kasus perlakuan lumba-lumba di Taiji , Jepang berdasarkan pendekatan neorealisme. Kajian terkait dengan 2 variabel yang berpengaruh secara struktural yakni orientasi power (bagaimana kekuatan dalam organisasi dapat diarahkan) di dalam organisasi dan desain organisasi (problematika dasar pembentukan organisasi. Di Taiji, Jepang terdapat praktik perburuan lumba-lumba dengan metode pembunuhan yang tidak manusiawi dalam jumlah yang besar sehingga mengancam stabilitas populasi lumba-lumba. IWC di dalam menghadapi kasus perlakuan lumba-lumba di Taiji, Jepang memiliki sikap yang berbeda dibandingkan kasus-kasus perlindungan small cetaceans lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terus berlangsungnya pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji hingga saat ini dengan jumlah yang besar meskipun terdapat berbagai tuntutan di tingkat internasional.

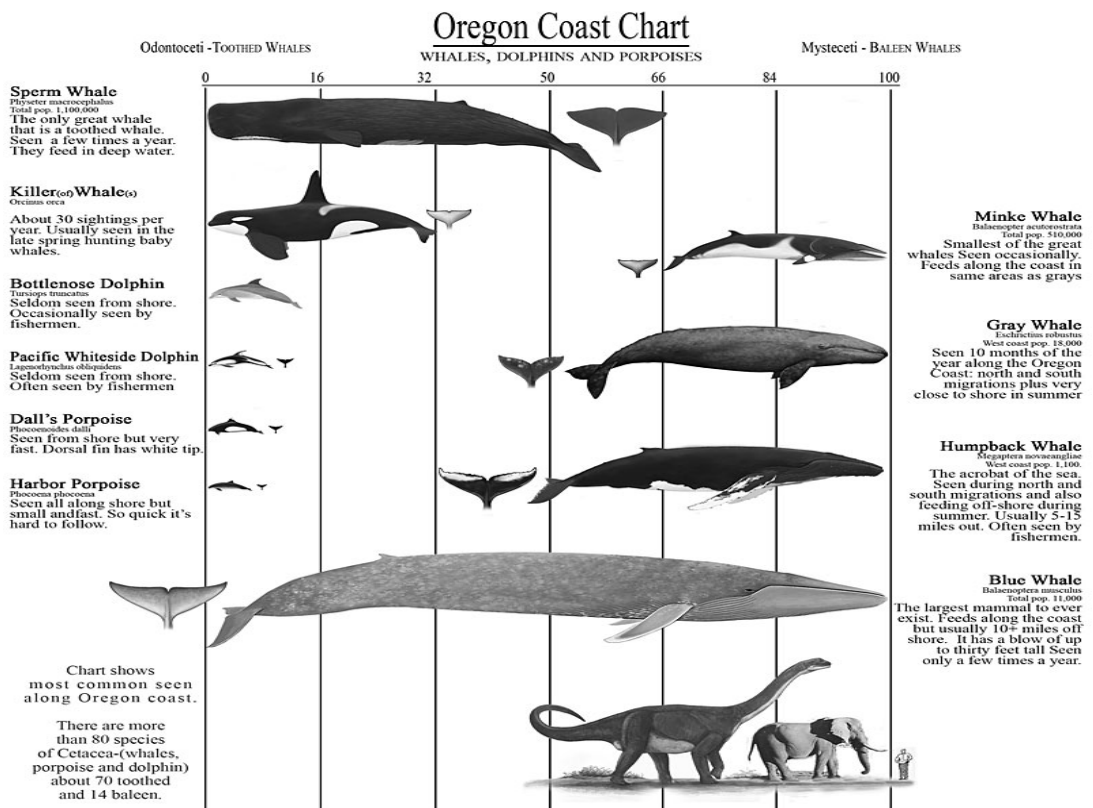
Kata-Kata Kunci: *IWC, Neorealisme, Mandat IWC, Pembunuhan dan Penangkapan Lumba-Lumba Taiji, Jepang, Orientasi Power, Desain Organisasi, Organisasi Internasional, Small Cetaceans, Jepang.*

Paus merupakan salah satu hewan yang memiliki status terancam punah. Oleh karena itu, banyak upaya telah dilakukan secara internasional untuk melindungi paus dari ancaman kepunahan. Hal ini juga diketahui bahwa eksploitasi berlebihan oleh industri penangkapan ikan paus menyebabkan penurunan yang serius di banyak populasi paus dunia, meskipun untungnya tidak ada spesies paus yang benar-benar telah punah dan sekarang banyak spesies paus berada dalam proses pemulihan, meskipun tidak semuanya (IWC, 2014). Selama ini, secara umum sering kali paus di identifikasikan sebagai mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru dan berbentuk ikan berukuran besar. Namun sesungguhnya paus terdiri dari berbagai spesies yang tidak hanya meliputi hewan-hewan berukuran besar seperti yang terlihat dalam gambar 1.1. Lumba-lumba, paus minke, pesut dan lainnya merupakan bagian spesies paus berukuran kecil (*small cetaceans*) yang sering kali terlupakan didalam upaya perlindungan populasi paus.

Badan antar-pemerintah global yang diakui secara resmi oleh United Nations yang bertugas untuk konservasi ikan paus dan pengelolaan penangkapan ikan paus adalah IWC. IWC dibentuk di bawah International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) yang ditandatangani pada tahun 1946. Saat ini, 88 negara menjadi anggota IWC (IWC, 2014). Sayangnya, sejak IWC dibentuk masih banyak praktik perburuan paus komersial yang tidak dapat dihentikan utamanya paus-paus berukuran kecil. IWC merupakan organisasi yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi lumba-lumba dan paus kecil lainnya. Sejak tahun 1979 IWC telah membentuk *sub-committee* yang bekerja untuk memperhatikan hewan-hewan yang tergolong dalam kategori paus kecil seperti lumba-lumba (IWC, 2014). Tidak ada pendefinisian yang jelas mengenai paus oleh ICRW memunculkan pemahaman yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya menyulitkan upaya perlindungan paus.

Implementasi Mandat International Whaling Commission (IWC) dalam Kasus Perlakuan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang

Gambar 1.1 Perbandingan Ukuran Tubuh Paus (Oregon State Parks, 2014).



Whales and other cetaceans that visit the Oregon Coast.



Environmental Investigation Agency menyatakan bahwa sekitar jutaan paus bergigi, lumba-lumba dan sejenisnya yang secara umum dikenal sebagai 'bangsa ikan paus kecil (*small cetaceans*), telah dibunuh dalam pemburuan secara langsung di Jepang dalam 70 tahun terakhir (EIA, t.t) Penjelasan serupa dinyatakan pula oleh Rossiter dalam Cetacean Society International dengan penekanan pada wilayah Taiji, Jepang. Taiji merupakan salah satu tempat yang menyumbangkan hasil pemburuan lumba-lumba dengan jumlah yang besar. Sekitar 400.000 lumba-lumba dari 12 spesies telah dibunuh dalam pemburuan dengan metode *drive / harpoon hunting* di Peninsula dan Taiji sejak pencatatan dimulai tahun 1942 (Rossiter, 2012). Environmental Investigation Agency menambahkan bahwa limit penangkapan yang ditentukan oleh

pemerintahan Jepang semakin besar tiap tahunnya, untuk tahun 2013 mengizinkan pembunuhan 16.655 golongan paus kecil (EIA, t.t). Angka ini merepresentasikan pemburuan ikan jenis paus terbesar di dunia. Sebuah analisis komprehensif dari data ilmiah Environmental Investigation Agency bekerja sama dengan organisasi lingkungan di Jepang lainnya menggambarkan dengan tegas bahwa tidak ada perhatian dari berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab sehubungan dengan keberlanjutan dari pemburuan ini (EIA, t.t). Pada kenyataannya, terdapat lebih dari satu Organisasi Internasional (OI) bertema lingkungan ternama yang memiliki agen lokal di Jepang. Jepang sendiri adalah salah satu negara yang terdaftar sebagai anggota dari IWC.

Pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba yang terjadi di teluk tersembunyi dari luar Taiji, tersembunyi dari mata publik, namun banyak aktivis telah memasuki daerah untuk mendapatkan video pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba dan banyak yang telah ditangkap karena nelayan menyulut perkelahian sehingga mereka dapat membuat para aktivis ditangkap dan dikeluarkan dari daerah wilayah Taiji sehingga tidak dapat melanjutkan upaya-upaya publikasi maupun penghentian kegiatan pemburuan lumba-lumba di Taiji (Kish, 2014). Pembunuhan dan penangkapan 20.000 lumba-lumba, pesut, dan paus kecil terjadi di Jepang setiap tahun yang dimulai pada 1 September dan biasanya terus berlanjut sampai Maret tahun berikutnya dimana nelayan menggiring seluruh keluarga *cetaceans* kecil menuju teluk dangkal dan kemudian membunuh kawanan hewan ini dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi. Para konservasionis Amerika Serikat mengatakan beberapa lumba-lumba akan ditahan dalam kurungan penangkaran permanen sementara yang lain akan dibunuh untuk diambil dagingnya.

Meskipun demikian, *sub-committee on small cetaceans* IWC yang berada di bawah *Scientific Committee* IWC masih dapat berperan aktif dalam perlindungan lumba-lumba dan paus kecil di wilayah selain Jepang seperti; melindungi *vanquita* di wilayah Teluk California di Meksiko, melindungi lumba-lumba Maui di New Zealand, dan perlindungan pesut pelabuhan di laut Baltik melalui pengimplementasian Agreement on the Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) (IWC, 2014). Di Surat kabar online New Zealand Herald bahkan dikatakan bahwa IWC memiliki “extreme concern” pada perlindungan lumba-lumba New Zealand (Morton, 2014). Kemudian, pada website resmi IWC yang menunjukkan perhatian IWC pada persoalan paus-paus terdampar. Di sana jelas-jelas disebutkan perhatian pada lumba-lumba yang terdampar pula sebagai berikut; “many species of whales and dolphins are vulnerable to collisions with vessels” (IWC, 2014). Namun dibalik kinerja aktif IWC melindungi paus kecil di negara-negara tersebut, menjadi suatu keganjilan bahwa sampai

saat ini IWC masih belum dapat menghentikan pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji, Jepang. Maka dari itu, penulis berupaya mengkaji kasus ini dengan menggunakan teori-teori mengenai Organisasi Internasional (OI) dan hubungan OI dengan negara.

Perspektif Neorealisme: Hubungan OI dan Negara

Peran organisasi-organisasi internasional dapat diperdebatkan apakah institusi internasional harus diperlakukan sebagai aktor dengan hak mereka sendiri daripada sebagai *epiphenomenal* (posisi realis), sebagai arena sederhana yang di dalamnya terdapat negara-negara yang berinteraksi (posisi neoliberal klasik), atau sebagai konteks sosial yang membentuk kepentingan negara (posisi khas konstruktivis) (Haftel, 2006). Perspektif realis pesimis terhadap upaya kerjasama antar negara melalui OI. Pendekatan realis yang menekankan asumsi bahwa setiap negara yang melakukan hubungan internasional tentu mengedepankan pencapaian kepentingan nasionalnya sehingga kepatuhan pada OI hanya berupa upaya pencapaian kepentingan (Simmons, 1998). Posisi neoliberal melihat bahwa sifat kooperatif yang ada di dalam organisasi internasional mampu menciptakan beberapa tujuan bersama bagi negara anggota yang di antaranya adalah mampu mencapai kepentingan-kepentingan kolektif, mampu berkolaborasi dengan mengurangi kecurigaan satu sama lain negara melalui penyediaan informasi, memecahkan masalah yang terkoodinasi, dan masih banyak yang lainnya (Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snnidal, 1998). Sedangkan bagi perspektif konstruktivis, OI ada bukan semata-mata dikarenakan adanya kepentingan negara maupun demi kerjasama melainkan dikarenakan oleh adanya konstruksi sosial. Konstruktivis melihat OI masih dapat menjadi pedoman pembentukan kebijakan-kebijakan negara. OI mampu memberikan gambaran untuk negara-negara yang ada dalam memahami prosedur pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut seakan berpengaruh terhadap cara pandang sebuah negara untuk lebih memikirkan *cost* and *benefit* dari tindakan yang diambil (Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snnidal, 1998).

Penulis berusaha mengkaji IWC melalui perspektif neorealisme. Pandangan neorealisme yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz ini memiliki perbedaan dengan pandangan realisme yang menitikberatkan kedaulatan negara sebagai pusat dari tindakan negara dalam kondisi dunia yang anarkis. Neorealisme menjelaskan bahwa penting bagi suatu negara mengikuti institusi sebagai upaya penjagaan keamanan negara. Bahwa *power* dan *interaction* merupakan hal yang harus dipertimbangkan negara dalam sebuah struktur internasional.

Neorealisme menjelaskan bahwa distribusi kekuatan dan kepentingan negara akan mempengaruhi perilaku negara (Dunne dan Schmidt, 2005). Karena di sini terlihat bahwa negara dapat menjadi pengaruh utama dalam OI, maka penulis juga berusaha menganalisis lebih dalam mengenai peran negara terhadap OI. Di kasus ini maka perlu melihat politik domestik dalam negara yang bersangkutan.

Teori *Quadruple Helix* biasanya digunakan untuk memperlihatkan adanya inovasi, revolusi atau perubahan dalam kondisi politik domestik suatu negara dikarenakan adanya hubungan yang saling mempengaruhi diantara 4 *Helix* dalam negara yakni universitas (institusi sumber pengetahuan), pemerintah domestik, industri dan masyarakat. Teori *Quadruple Helix* menjadi perpanjangan dari teori *Triple Helix* dengan menambahkan elemen masyarakat di dalam analisis keadaan domestik suatu negara. Peran masyarakat menjadi penting sebagai sumber inovasi di dalam politik domestik negara. Melalui teori *Quadruple Helix* dapat dianalisis kondisi politik domestik Jepang yang kemudian berpengaruh pada politik luar negeri Jepang terhadap IWC. Ke-empat *helix* harus dapat bekerja dengan seimbang agar dapat membentuk keadaan yang inovatif dalam kondisi domestik negara (Rahayu, 2013). Ketika salah satu *helix* terlalu dominan dibandingkan *helix* lainnya, atau bahkan terdapat kelumpuhan beberapa *helix* keadaan domestik cenderung sulit menemukan hal-hal inovatif. Inovasi lokal ini penting untuk membentuk ide-ide penyelesaian permasalahan yang diambil sebagai kebijakan negara sehingga nantinya juga dapat tersalurkan pada politik luar negeri suatu negara (Rahayu, 2013). Maka, refleksi yang dihasilkan oleh interaksi 4 *helix* ini dapat mempengaruhi pula tindakan negara pada OI.

OI – entitas antar pemerintah yang didirikan dengan sebuah perjanjian, biasanya terdiri dari sekretariat permanen, sidang-sidang pleno yang melibatkan seluruh negara anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi yang lebih terbatas – merupakan fenomena abad ke dua puluh yang memiliki sedikit persamaan dengan bentuk kooperasi terinstitusionalisasi sebelumnya termasuk dengan yang telah ada pada masa kuno (Alvarez, 2006).

Lebih spesifik lagi, Yearbook of International Organization menjelaskan bahwa *Intergovernmental Organization* (IGO) didasari oleh instrument formal perjanjian diantara pemerintah negara-bangsa; meliputi 3 atau lebih negara-bangsa sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian; memiliki sekretariat tetap melakukan suatu yang sedang berlangsung (Burall dan Neligan, t.t). IWC adalah IGO yang berarti pada proses kerjanya lebih dominan melakukan kegiatan pada tingkat konsensus daripada teknis. Konsensus sebagai *decision making procedure* mulai populer tahun 1970 sebagai hasil dari bertambahnya jumlah negara yang terlibat aktif dalam politik internasional secara mandiri

(Movsisyan, 2008). Ide utama dari prinsip konsensus adalah untuk menyediakan representasi dan kekuatan *voting* yang setara untuk seluruh negara yang berpartisipasi di dalam OI dengan mengambil keputusan melalui konsensus (Movsisyan, 2008). Namun hal ini bukan berarti konsensus selalu dapat menghasilkan kebijakan atau perjanjian yang benar-benar netral. Crawford & Lenway (1985) berargumen bahwa pengaruh negara – negara hegemon yang mendominasi negara subordinat juga memiliki efek terhadap tingkat kepatuhan terhadap suatu perjanjian yang dalam hal ini juga mempengaruhi hasil konsensus. Kerjasama terjamin ketika hegemon mengontrol berbagai sumber daya dimana negara-negara lainnya juga tergantung, dan dapat menawarkan atau menahan mereka dalam pertukaran untuk mematuhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara hegemon.

Maka di dalam kasus ini, IGO memerlukan pengontrol. Fungsi ini banyak dilakukan oleh NGO. Meski terkadang sifat kontrolnya adalah berbeda-beda, pertimbangan dari NGO penting bagi IGO. NGO bergerak secara teknis dan penting untuk mempertegas situasi dan seharusnya menjadi pengontrol IGO dalam kontroversi perlindungan lumba-lumba yang terjadi di Taiji, Jepang. Namun perlu diingat bahwa NGO maupun INGOs ada pada tingkat yang lebih rendah dari organisasi internasional sebagaimana yang dinyatakan oleh Koremenos et al (2001) bahwa di tingkatan yang lebih rendah organisasi internasional bisa dibentuk oleh kelompok kepentingan dan korporasi. Selain itu, di dalam IGO terdapat suatu kelemahan mendasar yakni kecenderungan bahwa negara-bangsa yang kuat mampu untuk mengimplementasikan perjanjian internasional pada level sub-nasional (Kern dan Löffelsend, 2004) Bahkan Kern & Löffelsend (2004) menjelaskan bahwa untuk memecahkan permasalahan lingkungan, IGO tergantung pada kapasitas nasional untuk mempengaruhi perubahan di tingkat sub-nasional. Hal ini juga menjadi salah satu indikasi persoalan dalam IWC yakni sumber daya IWC baik informasi ilmiah dan finansial yang sangat tergantung pada anggotanya.

Koremenos et al (2001) menjelaskan pula bahwa terdapat 5 dimensi kunci yang dapat menyebabkan variasi dari bentuk atau sifat organisasi internasional yakni; (1) Peraturan keanggotaan (*membership*), (2) Ruang lingkup isu yang diliputi (*scope*), (3) Sentralisasi tugas (*centralization*), (4) Peraturan untuk mengontrol institusi (*control*), (5) Fleksibilitas perencanaan (*flexibility*). Terkadang organisasi internasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan adanya pengaruh dari elemen-elemen ini. Institusi memiliki pengaruh yang minimal pada perilaku negara, dan dengan demikian memegang sedikit harapan untuk mempromosikan stabilitas dalam dunia setelah Perang Dingin (Mearsheimer, 2002). Singkatnya,

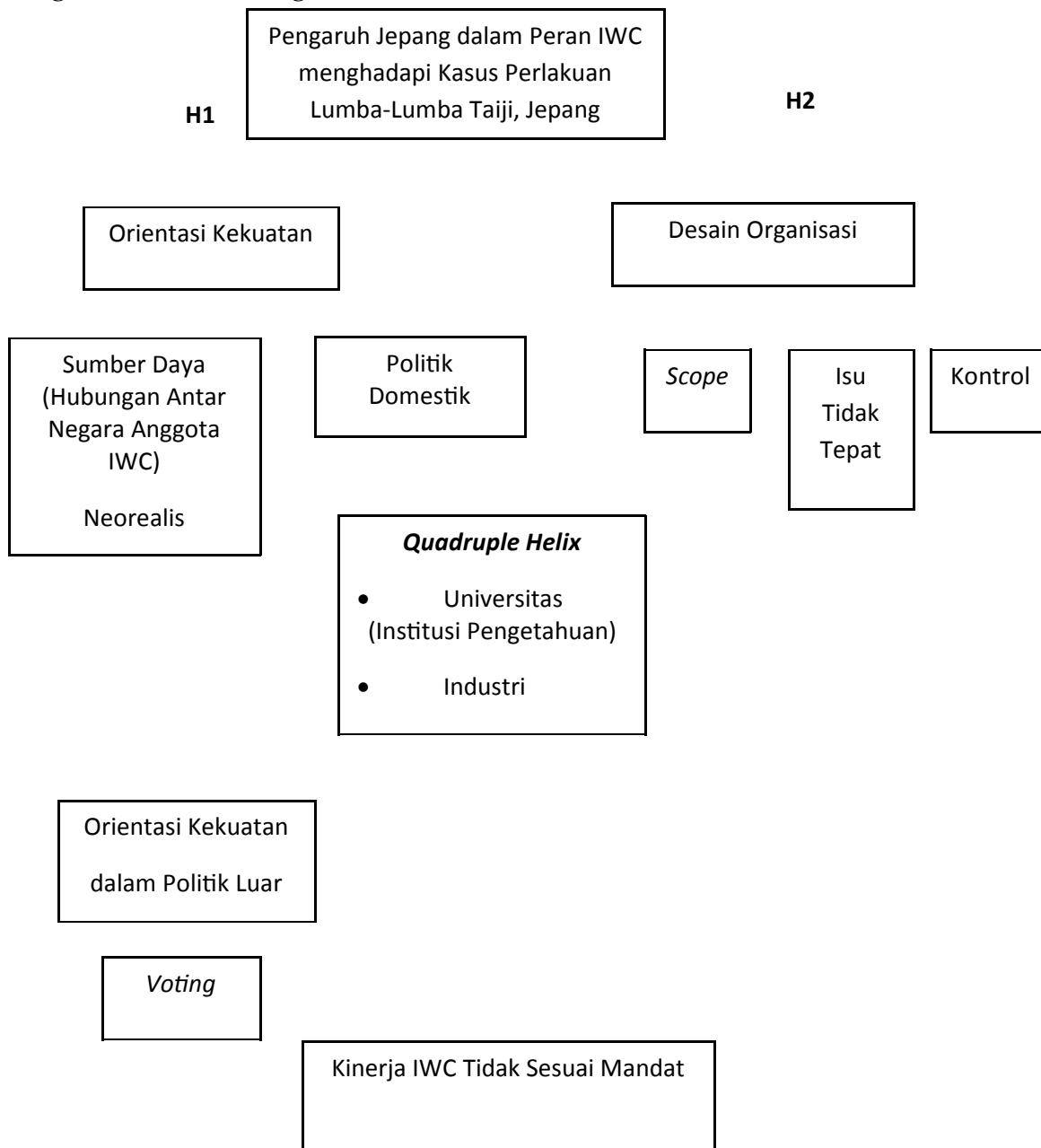
sebagaimana pandangan Mersheimer (2002) bahwa organisasi internasional tidak dapat memenuhi begitu banyak harapan yang tertanamkan di dalam mereka.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penulis merumuskan skema kerangka pemikiran sebagaimana yang dapat dilihat pada bagan 1.1. Hubungan antara pengaruh Jepang dalam peran IWC dan kinerja IWC yang tidak sesuai mandat dipengaruhi oleh interaksi organisasi internasional pada 2 variabel yakni orientasi kekuatan dan desain organisasi. Hubungan OI dengan orientasi kekuatannya ini dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan Koremenos et.al (2001) mengenai pembentukan institusi dan pengaruh negara pada isu lingkungan yang dikemukakan Kern & Löffelsend (2004) serta teori *Quadruple Helix*. Koremenos memperlihatkan bahwa keanggotaan, sentralisasi dan kontrol dalam organisasi dapat membentuk kekuatan yang menjalankan organisasi. Hal ini terimplementasikan dari *voting* yang bersumber dari anggota dan sumber daya seperti legitimasi, dana, informasi dan lainnya yang datang dari anggota. Sedangkan interaksi yang terjadi antara pengaruh Jepang dalam peran IWC dengan desain organisasi bisa dijelaskan dengan menyinggung teori konversi power negara pada perjanjian internasional yang dikemukakan oleh Sarooshi serta elemen *scope*, *control* dan *flexibility* yang mempengaruhi desain organisasi seperti yang dinyatakan oleh Koremenos et al.

Di bagan 1.1 juga tergambar hipotesis bahwa IWC tidak berjalan sesuai mandatnya ketika menghadapi Jepang dalam kasus perburuan besar-besaran lumba-lumba di Taiji karena 2 sebab. Pertama, orientasi dari organisasi tersebut yang masih diarahkan oleh *voting* dan sumber daya yang merepresentasikan kekuatan (*power*) negara Jepang sebagai pemerintah domestik yang berhubungan langsung dengan kasus. Kedua, permasalahan dalam desain organisasi IWC yang membahas *scope* organisasi yang belum mencakup kejelasan mengenai pelaksanaan kinerja organisasi, ambiguitas ruang lingkup isu dari organisasi sendiri sehingga tidak fokus pada perlindungan lumba-lumba, dan kurangnya sistem kontrol IWC.

*Implementasi Mandat International Whaling Commission (IWC) dalam Kasus
Perlakuan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang*

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan: H = Hipotesis

Orientasi *Power* dalam IWC

Pada tahun 1951 Jepang bergabung sebagai anggota IWC. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa kepentingan utama Jepang di IWC adalah untuk menjaga prinsip pemanfaatan berkelanjutan, yang berlaku untuk forum internasional lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan satwa liar dan sumber daya hayati laut / perikanan (Ministry of Foreign Affairs Of Japan, 2014). Jepang sebagai negara yang berkaitan langsung dengan kasus, dapat memiliki pengaruh besar secara domestik dan juga mempengaruhi di tingkat internasional melalui *voting* dan sumber daya organisasi IWC. Jepang dapat mengarahkan IWC untuk membenarkan praktik perburuan lumba-lumba di Taiji dan perburuan paus Jepang lainnya. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jepang dalam IWC, hal pertama yang perlu dibahas adalah mengapa Jepang selalu bersikap *pro-whaling* (mendukung perburuan paus). Teori *Quadruple Helix* dapat membantu dalam melihat kekuatan negara Jepang secara domestik yang kemudian dapat mempengaruhi orientasi *power* dalam IWC. Interaksi 4 *helix* (pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis dan universitas) di Jepang akan menghasilkan sikap dari negara itu sendiri. Pada Tabel 1.1 Penulis telah menyajikan klasifikasi *helix* yang terdapat dalam negara Jepang.

Tabel 1.1 Klasifikasi 4 *helix* yang Terlibat dalam Isu Lingkungan Jepang

Jenis Helix	Representasi Helix di Jepang
<i>Helix</i> I (para penyedia pengetahuan dan teknologi)	- Universitas (Tohoku University, Univ Tsukuba, The University of Tokyo, Nagoya University, Kyoto University, Kyushu University, Keio University, Sophia University, Waseda University, University) (Global 30, 2014). - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). - National Institute for Environmental Studies - National Environmental Research and Institute (NETI). - Japan Fisheries Agency (spesifik kasus lumba-lumba di Taiji). - National Research Institute of Far Seas Fisheries (NRIFSF).
<i>Helix</i> II (sektor industri /	Produsen dan Distributor Peralatan Lingkungan

*Implementasi Mandat International Whaling Commission (IWC) dalam Kasus
Perlakuan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang*

bisnis)	• Japan Environmental Management Association Industry (JEMAI). • Kyodo Senpaku (perusahaan yang dikontrak untuk melakukan <i>Scientific Whaling</i>). • Industri Lumba-Lumba Taiji (misalnya; Association of Zoos and Aquariums / JAZA, Union, Dolphin Base/Dolphin Resort, dan Taiji Development Public Corporation).
<i>Helix</i> III (Pemerintah)	• Environment Agency (Dibentuk tahun 2001) • The Ministry of International Trade & Commerce (MITI), • The Ministry of Finance, • The Ministry of Foreign Affairs (MoFA), • The Ministry of Agriculture, Forest, and Fisheries (MAFF), • The Ministry of Transportation (MoT), • The Ministry of Construction (MoC) (Schreier, 2003) • Pemerintah daerah administrasi Wakayama (kasus lumba-lumba Taiji).
<i>Helix</i> IV (Masyarakat)	• Masyarakat Jepang. • Lembaga Swadaya Masyarakat / <i>Nongovernmental Organization</i> (LSM/NGO). • Media Masa. • Masyarakat Taiji (spesifik kasus lumba-lumba Taiji).

Helix I berfungsi untuk menyediakan informasi/pengetahuan tentang isu-isu lingkungan di Jepang dan potensi yang dimiliki Jepang untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. *Helix* II berfungsi untuk menterjemahkan inovasi/pengetahuan dari penyedia teknologi ke dalam suatu produk/peralatan/bahan yang dibutuhkan masyarakat. *Helix* III berfungsi untuk memberi naungan kebijakan dan bantuan yang mendukung, terutama untuk masyarakat. *Helix* IV berfungsi sebagai tempat lahirnya ide, yakni inovasi atau pengetahuan apa yang dibutuhkan masyarakat sesungguhnya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di mereka (Rahayu, 2013). Namun di Jepang terjadi ketimpangan dalam interaksi 4 *helix* tersebut. Pemerintah sebagai *helix* III cenderung mendominasi *helix-helix* lainnya.

Mengenai orientasi kekuatan, di Jepang sendiri sejarahnya sangat sulit bagi organisasi bertema lingkungan untuk melakukan pengaruh pada kebijakan domestik negara Jepang. Pergerakan lingkungan di Jepang mengalami banyak hambatan politik dan budaya dan relatif terdiam pada tahun 1970an sampai 1980an (Reimann, 2003). Hambatan politik dan budaya datang dari hubungan antara masyarakat dan pemerintah di Jepang yang cenderung bersifat hirarki. Bentuk hirarki sosial kuno di Jepang di dasarkan pada kekuatan dan wibawa yang kemudian secara

garis besar menempatkan bangsawan pada tingkat tertinggi, petani dan nelayan pada kelas menengah (status cukup tinggi karena dianggap sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat), dan pedagang pada kelas yang rendah (Hierarchy Structure, 2013). Kritik dan perlawanan terhadap pemerintah merupakan hal yang tabu. Kebiasaan ini merupakan warisan dari bentuk pemerintahan kekaisaran Jepang. Gelombang pergerakan organisasi lingkungan baru mulai mengalami pengaruh pada negara Jepang sekitar tahun 1990an dimana mulai bermunculan demonstrasi dari pihak NGOs Internasional terutama mengenai isu-isu pencemaran lingkungan dan *global warming*. Formasi kebijakan lingkungan negara Jepang telah lama didominasi oleh kekuatan negara (Schreurs, 1996).

Di pemerintahan Jepang, partai besar yang berkuasa seperti Liberal Democratic Party (LDP, *jimintō*, 自民党) dan Democratic Party of Japan (DPJ, *minshutō*, 民主党), serta partai kecil seperti New Kōmeitō Party (NKP, *kōmeitō*, 公明党) dan the Communist Party (JCP, *nihon kyōsantō*, 日本共産党) telah lama berada pada pihak yang mendukung perburuan paus (Wouters, 2009). Pemerintah Jepang juga lebih condong mendukung kegiatan berburu paus karena telah dianggap menjadi tradisi ribuan tahun dan melindungi mata pencaharian masyarakat (Facts About Japan, 2014). Sedangkan untuk spesifiknya pada kasus perburuan lumba-lumba Taiji, *helix III* baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berusaha untuk tidak menghiraukan tuntutan internasional dan mendorong masyarakat untuk mendukung keberlangsungan praktik perburuan ini. Pemerintah Jepang membagikan ribuan izin baru untuk nelayan Jepang untuk berburu lumba-lumba. Beberapa kota, seperti Futo, di pantai barat daya Tokyo, telah menyerah dan tidak mau melakukan praktik *drive hunt* lumba-lumba karena dianggap terlalu sulit dibandingkan dengan perburuan ikan biasa, namun Pemerintah Jepang terus mengeluarkan kuota bagi mereka untuk membunuh lumba-lumba meskipun nelayan Futo menolak (Palmer, 2014).

Dikarenakan adanya dominasi *helix III*, Jepang memberikan beberapa klaim untuk perlindungan posisi *pro-whaling* nya dengan memanfaatkan *helix* lain sebagai alasan. Pada penjelasan oleh Bowwet dan Hay klaim-klaim tersebut adalah; (1) klaim budaya - Tokyo telah memberikan permohonan pada IWC agar empat masyarakat pesisir Jepang di Abashiri, Ayukawa, Taiji dan Wadaira diberikan hak "*Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)*" seperti yang telah diberikan pada masyarakat adat di Kutub Utara; (2) klaim sosial - Tokyo menegaskan bahwa komunitas ini secara tradisional bergantung pada apa yang dikenal sebagai perburuan paus jenis kecil dan bahwa aktivitas berburu serta pengolahan hewan penting dalam menjaga integritas dan identitas masyarakat sosial; (3) klaim ilmiah - *Government of Japan*

(GOJ) berpendapat bahwa tujuan perburuan paus ilmiah ini adalah untuk membangun sistem bertujuan konservasi dan pengelolaan paus *sperm, minke, bryde* dan *sei*; (4) Klaim kelestarian - Tokyo menegaskan bahwa sebagian besar stok paus telah pulih ke tingkat yang cukup untuk pemanenan berkelanjutan dikarenakan perburuan paus "Japanese-Style" yang melakukan pemanfaatan penuh bangkai ikan paus (Bowwet dan Hay, 2009).

Dominasi *pro-whaling* dalam negara Jepang secara domestik inilah yang kemudian direfleksikan oleh Jepang dalam keanggotaannya di IWC. Pada proses pengambilan kebijakan dalam OI, terdapat kemungkinan adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan organisasi kepada pemenuhan kepentingan tertentu. Pada kasus ini, penulis melihat bahwa memungkinkan bagi pemerintah domestik Jepang untuk mengarahkan keputusan IWC melalui proses pengambilan kebijakan IWC. Salah satu keunggulan posisi Jepang dalam IWC adalah bahwa Jepang termasuk dalam jajaran pimpinan pada dewan komisioner IWC. Jepang merupakan bagian dari kelompok kecil yang merepresentasikan Komite Ilmiah IWC yang disebut sebagai *Data Availability Group*. Hal ini menunjukkan bahwa rezim dalam IWC berupa *Imposed orders* yang merupakan tipe rezim yang berjalan dibawah pimpinan sebuah atau sejumlah negara dominan. Perlu dipahami bahwa pengambilan keputusan di IWC dilakukan setiap pertemuan komisi yang biasanya dilakukan satu kali setiap tahun. Namun Sejak tahun 2012, pertemuan komisi IWC untuk mengambil keputusan dilakukan satu kali setiap dua tahun. Penulis menganalisa dari 2 bentuk proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan di IWC yakni konsensus dan pemungutan suara (*voting*). Keputusan Komisi diambil pada pertemuan, baik melalui konsensus atau melalui pemungutan suara, tidak dianggap diterapkan sampai teks telah diberikan kepada semua Anggota Komisi, atau disajikan kepada mereka dengan cara elektronik, dan kemudian disetujui oleh Komisi (IWC, 2014).

Tahun ini IWC telah memiliki 88 negara anggota. Negara anggota IWC sampai saat ini telah terpolarisasi menjadi 2 blok yakni negara yang *pro-whaling* (pihak yang menginginkan keberlanjutan industri pemburuan paus) dan negara yang *anti-whaling* (pihak yang menentang pemburuan paus). Polarisasi ekstrim dan sikap non-konsiliasi konsekuensi di mana Komisi beroperasi telah menghasilkan sebuah Komisi yang tidak dapat membuat kompromi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan negara-negara anggotanya (Iwasaki-Goodman, 1994). Tidak semua negara tetap kukuh berada pada satu blok tertentu, masih terdapat negara yang berubah-ubah posisi dan juga negara yang mengambil posisi netral. Kurangnya

kompromi atau upaya untuk beroperasi dengan konsensus dan kurangnya diskusi bermakna mengenai hal-hal substantif atau usaha negosiasi antara negara-negara *pro-whaling* dan negara-negara *anti-whaling* di IWC memungkinkan posisi mayoritas untuk secara konsisten menang atas minoritas (Iwasaki-Goodman, 1994). Keberadaan 2 blok yang hampir sama kuat di dalam IWC sering menjadikan proses pengambilan keputusan dengan konsensus sering tidak menemukan hasil dan berujung pada *voting*.

Ketika pengambilan keputusan berujung pada *voting*, Pemerintah Jepang dapat memiliki posisi yang menguntungkan karena adanya syarat pemenuhan $\frac{3}{4}$ suara untuk dapat disetujuinya suatu resolusi. Jepang memiliki pengaruh besar dalam sumber daya IWC baik secara langsung pada organisasi maupun pada anggota terutama di bidang ilmiah yang dapat mengarahkan pembenaran pada Jepang. dua kapal besar yang dimiliki oleh IWC untuk melakukan program penelitian paus internasional yakni Southern Ocean Whale and Ecosystem Research Programme (SOWER) dan Pacific Ocean Whale and Ecosystem Research Programme (POWER) merupakan hibah dari Jepang (IWC, 2014). Disamping itu, Dolsak dan Miller (2007), Strand dan Truman (2009), Dippel (2014) telah melakukan penelitian kuantitatif yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pemberian bantuan dari Jepang terhadap sikap *voting* negara penerima bantuan untuk lebih berpihak pada Jepang. Tahun ini, dalam sebuah wawancara dengan ABC TV Australia, seorang pejabat senior Badan Perikanan Jepang, Maseyuku Komatsu, mengakui bahwa Jepang telah menggunakan bantuan luar negeri untuk mengamankan dukungan pada kampanye Jepang agar menghapuskan larangan internasional IWC terhadap perburuan ikan paus komersial (Greenpeace, 2014).

Problematika Desain Organisasi IWC

Dasar pembentukan OI terutama dapat dilihat dari perjanjian internasional yang mengawalinya. Perjanjian internasional ini pula yang menjadi tempat diterapkannya kepatuhan (*compliance*) kepada OI. Meningkatkan kepatuhan menjadi hal penting dalam suatu perjanjian, karena kepatuhan itu sendiri menjadi manfaat terkait dengan kepentingan anggotanya (Chayes dan Chayes, 1993). Abram dan Antonia Chayes (1993) mengindikasikan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan penyimpangan atau ketidakpatuhan pada perjanjian internasional yakni; ambiguitas dan ketidakjelasan bahasa yang pada akhirnya memunculkan banyak misinterpretasi, terbatasnya kapasitas yang berbeda-beda diantara anggota dan personal dalam organisasi

sehingga kemampuan untuk menerjemahkannya dalam kebijakan adalah terbatas, serta adanya dimensi temporal terkait dengan perubahan sosial ekonomi yang ada di level domestik dan internasional yang lantas memberikan pengaruhnya pada organisasi (Chayes dan Chayes, 1993).

IWC pada awalnya dibentuk dengan dasar perjanjian yang dikenal sebagai International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). IWC memiliki keanggotaan yang bersifat umum yakni membuka kesempatan bagi setiap negara yang ingin menjadi anggota, namun memiliki tugas yang spesifik yakni hanya meliputi isu-isu paus. Sebagai IGOs, legitimasi IWC bergantung pada ratifikasi negara anggotanya terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati. Maka dari itu, kejelasan mandat yang diatur dalam ICRW menjadi penting agar IWC dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya kesamaan pandangan terhadap tujuan dan tugas IWC diantara negara anggotanya. Namun yang terjadi pada IWC saat ini adalah kesimpangsiuran mengenai hak dan kewajiban negara anggota IWC. Salah satu contoh terdapat pada pembukaan ICRW yang menyatakan; “Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry” (International Convention for the Regulation of Whaling, 1946), kalimat ini menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara anggota yakni fokus pada konservasi atau fokus pada pengembangan industri paus. Kemudian pada pasal IV (mengenai penelitian ilmiah) dan pasal VIII (mengenai izin khusus penangkapan paus) dapat menjadi celah bagi negara anggota untuk tetap melakukan perburuan paus. Pada ICRW pasal VIII ayat 1 tertulis; “Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention” (International Convention for the Regulation of Whaling, 1946). Pasal ini telah memberikan kesempatan bagi setiap negara anggota untuk mengajukan kuota yang dirasa sesuai oleh negara tersebut untuk melakukan perburuan paus. Bahkan telah terjadi perpecahan antara negara yang ikut dalam IWC berdasarkan tujuan mendukung kegiatan industri perburuan paus dengan negara yang ikut dalam IWC berdasarkan tujuan mendukung konservasi paus dunia. Hal ini sedikit ironis bahwa *pro-whalers* (anggota IWC yang mendukung industri perburuan paus) menuntut disfungsi dari IWC, tetapi merasa bahagia dengan susunan kata dalam ICRW, sementara para *anti-whalers* (anggota IWC yang menolak industri

perburuan paus) secara umum bahagia terhadap IWC yang sejauh ini telah mempertahankan moratorium dan membentuk cagar alam untuk perlindungan paus di wilayah Samudra Hindia dan Selatan, namun meyakini bahwa ICRW sudah tidak lagi relevan atau sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi kontemporer (Iliff, 2008). Hal ini menunjukkan terdapat ketidaksamaan persepsi dalam anggota IWC dan juga ambiguitas dalam ICRW yang menjadi dasar IWC.

Keanggotaan IWC yang bersifat terbuka bagi setiap negara yang ingin terlibat tanpa syarat tertentu kecuali pemenuhan dana kontribusi tahunan telah menciptakan ketidaksetaraan yang besar di dalam kapasitas anggota IWC. Tidak hanya negara yang terlibat secara langsung dengan praktik industri paus, IWC juga memperkenankan negara-negara yang bahkan tidak memiliki wilayah maritim untuk menjadi anggotanya seperti Mali, Mongolia, Austria, Republik Ceko, Hungaria, Luksemburg, Slovakia, Swiss dan San Marino. Tingkat perekonomian diantara anggota juga tidak memiliki standar khusus sehingga terdapat negara-negara dengan ekonomi lemah yang cenderung bergantung pada negara-negara dengan perekonomian kuat sebagai pendonor sebagaimana yang telah diejelaskan pada bab II. IWC juga meliputi negara dari berbagai region sehingga bersifat homogen di dalam budaya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan terjadi pemahaman yang berbeda diantara anggota IWC dikarenakan kapasitas tiap negara yang berbeda-beda.

Selain itu, mengenai perlindungan lumba-lumba, ICRW juga tidak memberikan penjelasan yang spesifik. Kesepakatan (melalui *voting* yang dimenangkan oleh mayoritas) untuk membentuk sub-komite yang mengkaji *small cetaceans* (spesies paus berukuran kecil seperti lumba-lumba) baru diadakan sejak tahun 1979. Namun, sampai saat ini masih terdapat negara-negara anggota IWC yang merasa bahwa perlindungan lumba-lumba bukanlah naungan IWC. IWC sendiri tidak menunjukkan fokus pada perlindungan lumba-lumba. Meskipun terjadi ancaman kepunahan terhadap banyak populasi *small cetaceans*, Jepang, Greenland dan Kepulauan Faroe (wilayah bagian dari pemerintahan Denmark) terus membunuh lumba-lumba pesisir dan jenis lumba-lumba lainnya dalam jumlah besar, menggunakan metode berburu tidak manusiawi dan tidak diatur (Departement for Environment, Food and Rural Affairs of United Kingdom, 2014). Di sini dapat dilihat bahwa mandat sesungguhnya dari IWC bahkan masih menjadi pertanyaan besar bagi negara-negara anggotanya.

Kesimpulan

IWC di dalam menghadapi kasus pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji, Jepang memiliki sikap yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan terus berlangsungnya pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba yang tidak manusiawi di Taiji hingga saat ini dengan jumlah yang besar meskipun terdapat berbagai tuntutan di tingkat internasional. Tindakan IWC terhadap kasus ini yang membuatnya menjadi melenceng dari mandat IWC ditentukan oleh dua variabel. Variabel penentu pertama adalah orientasi kekuatan di dalam organisasi IWC. Sedangkan Variabel penentu kedua adalah desain organisasi IWC.

Setelah menganalisa variabel pertama, penulis menemukan bukti bahwa orientasi kekuatan dalam organisasi IWC dapat dikendalikan Jepang melalui sumber daya organisasi dan juga kekuatan domestik Jepang. Sumber daya IWC banyak dikuasai Jepang dari sisi ilmiah sehingga dapat membenarkan kegiatan perburuan paus Jepang secara ilmiah. Jepang juga telah berhasil menciptakan ketergantungan IWC kepada negara Jepang melalui program-program penelitian perikanan Jepang. Teknologi mutakhir yang dimiliki Jepang dalam bidang penelitian ilmiah perikanan mempermudah Jepang untuk menguasai rasionalitas IWC dan membentuk kebenaran yang berpihak pada Jepang. Program penelitian besar IWC yakni POWER dan SOWER merupakan bagian dari bantuan yang diberikan oleh Jepang. Analisis menggunakan teori *Quadruple Helix* juga telah membuktikan bahwa secara domestik sisi *pro-whaling* Pemerintah Jepang juga berpengaruh kuat sehingga melemahkan *helix-helix* lain untuk menciptakan inovasi.

Mengenai adanya permasalahan pada variabel desain organisasi, dapat terbukti dari ICRW sebagai perjanjian yang melandasi berdirinya IWC memiliki terlalu banyak ambiguitas. Mulai dari pendefinisian kata "*whales*", izin perburuan paus tradisional, izin perburuan paus ilmiah, sampai pada desain teknis dalam sistem pengambilan keputusan pada IWC sering memudahkan terjadinya "pelegalan pelanggaran" dalam IWC. Sejak awal terbentuk, IWC telah banyak mengalami permasalahan di dalam kinerja organisasinya. Perjalanan IWC dari tahun ke tahun telah gagal dalam menciptakan baik konservasi maupun industri paus yang berkelanjutan. Fakta yang terjadi adalah jumlah paus baik yang besar hingga yang kecil justru terus tereksplorasi. Terlalu banyak ketidaksepahaman yang terjadi di dalam anggota IWC. Utamanya bagi lumba-lumba, akan sangat sulit mendapatkan perhatian penuh dari IWC melihat adanya kontroversi yang kuat diantara anggota mengenai *small cetaceans*.

Daftar Pustaka

Buku

- Burall, Simon dan Caroline Neligan. *The Accountability of International Organization*, Germany: Global Public Policy Institute, t.t.
- Dunne, Tim dan Brian C. Schmidt, "Realism," (2005), dalam John Baylis and Steve Smith *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Third Edition). New York: Oxford University Press.
- Schreurs, Miranda A. *Environmental Politics in Japan, Germany, and the United States*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Jurnal

- Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snnidal, "Why State Act Through Formal International Organizations," *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, No. 1 (Februari, 1998).
- Alvarez, Jose E. "International Organizations: Then and Now," *The American Journal of International Law*, Vol.100, No.2 (April, 2006), <http://jstor.org/stable/3651150>.
- Bowwet, Julia dan Pete Hay, "Whaling and its controversies : Examining the attitudes of Japan's youth", *Marine Policy*, Vol.33, Issue 5, (September 2009): 775-783.
- Chayes, Abraham & Antonia Handler Chayes. "On compliance," *International Organization*, Vol. 47, No. 2. (1993).
- Crawford, Beverly & Stefanie Lenway, "Decision Modes and International Regime Change: Western Collaboration on East West Trade," *World Politics*, Vol. 37, No. 3 (1985).
- Dolsak, Nives dan Andrew R. Miller, "Issue Linkages in Environmental Policy: The International Whaling Commission and Japanese Development Aid," *Global Environmental Politics* Vol. 7, No. 1 (February, 2007): 69-96.
- Haftel,Yoram Z. dan Alexander Thompson, "The Independence of International Organizations: Concept and Applications", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 50, No. 2 (April, 2006), <http://www.jstor.org/stable/27638486>
- Iliff, Mike. "Compromise in the IWC: Is it possible or desirable?," *Marine Policy* 32 (2008) 997-1003.
- Kern, Kristine dan Tina Löffelsend, "Governance Beyond the Nation-State: Transnationalization and Europeanization of the Baltic Sea Region," *Local Environment*, (2004), 9 (5), 451-467.
- Koremenos et al. "The Rational Design of International Institution," *International Organization*, Vol.55, No.4 (Autumn, 2001), <http://jstor.org/stable/3078615>
- Mearsheimer, John J. "The False Promise of International Institutions," *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: Norton, 2002).

- Movsisyan, S. "Decision Making by Consensus in International Organization as Form of Negotiation," 21st Century Information and Analytical Journal, No. 1 (3), 2008, http://www.noravank.am/upload/pdf/337_en.pdf (diakses 23 Oktober 2014).
- Rahayu, Sri. "The Quadruple Helix Model (Universities, Academic, Entreprises, Government, and Community) Sebagai Model Ideal untuk Sistem Inovasi Lokal Efektif terkait Penanggulangan Kemiskinan Di Negara Berkembang," Pusat Penelitian Perkembangan Iptek- LIPI, (2013), www.pappiptek.lipi.go.id (diakses 27 Oktober 2014).
- Schreurs, Miranda A. "International Environmental Negotiations, the State, and Environmental NGOs in Japan," (1996), <http://www.gdrc.org/ngo/jp-envi-ngo.html> (diakses 5 Oktober 2014).
- Simmons, Beth A. "Compliance with International Agreement," Political Science, (1998).

Website

- About Dolphins. What is Being Done to Protect Endangered Dolphins. <http://www.about-dolphins.com/what-is-being-done-to-protect-endangered-dolphins.php> (diakses 22 September 2014).
- Cove Guardians. Join the Cove Guardians and Help Stop the Senseless Slaughter of Dolphins in Taiji, Japan!. 2014. <http://www.seashepherd.org/cove-guardians/> (diakses 17 Maret 2014).
- Facts About Japan, "History of Japan," (2014), <http://www.facts-about-japan.com/whaling-history.html> (diakses 17 Desember 2014).
- Global 30. Environmental Studies. 2014. http://www.uni.international.mext.go.jp/course_list/environmental.html (diakses 31 Oktober 2014).
- Greenpeace. Vote Buying - Japan's Strategy To Secure A Return To Large-Scale Whaling. 2014. <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2001/11/vote-buying-japan-s-strategy.pdf> (diakses 5 Oktober 2014).
- Hierarchy Stucture. Ancient Japan Social Hierarchy. 2013. <http://www.hierarchystructure.com/ancient-japan-social-hierarchy> (diakses 17 Desember 2014).
- International Union for Conservation of Nature, "Chapter 4 Status of Cetacean Species and Selected Populations," (2014),

- <http://portals.iucn.org/library/efiles/html/SSC-Dolphins-wales-porpoises/Chapter%204.htm> (diakses 22 September 2014).
- International Whaling Commission (IWC). Status of Whales. 2014. <http://iwc.int/status> (diakses 18 Oktober 2014).
- , Sub Committee. 2014. <http://iwc.int> (diakses 18 Oktober 2014).
- , Vaquita: increasing concern for Mexico's 'little cow.'. 2014. <http://iwc.int/vaquita-increasing-concern-for-the-mexicos-little-> (diakses 18 Desember 2014).
- , Whales and Ship Strikes: A Problem for Both Whales and Vessels. 2014. <http://iwc.int/ship-strikes> (diakses 14 Mei 2014).
- , New IWC Bureau meets in St Lucia, September 2013. 2014. <http://iwc.int/bureau> (diakses 16 November 2014).
- , Key Documents: Rules of Procedures. 2014. <http://iwc.int/index.php?CID=convention> (diakses 19 November 2014).
- , International Research Cruises. 2014. <http://iwc.int/sower> (diakses 9 Desember 2014).
- Ministry of Foreign Affairs Of Japan. Japan and The Management of Whales. 2014. <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fishery/whales/japan.html> (diakses 15 November 2014).
- Oregon State Parks. Oregon Coast Chart. 2014. <http://www.oregonstateparks.org/> (diakses 17 Desember 2014).
- Save Japan Dolphins. Frequently Asked Questions. 2014. <http://www.savejapandolphins.org/take-action/frequently-asked-questions> (diakses 22 September 2014).

Dokumen Pemerintah Negara

- Department for Environment, Food and Rural Affairs of United Kingdom. Information Sheet: The International Whaling Commission and Small Cetaceans (porpoises, dolphins and small whales) .2014. <http://archive.defra.gov.uk/wildlife-pets/wildlife/protect/whales/documents/small-cetaceans.pdf> (diakses 24 November 2014).

Dokumen dan Laporan Organisasi

- Environmental Investigation Agency, Toxic Catch: Japan's unsustainable and irresponsible whale, dolphin and porpoise hunts, (October, 2013).

Whale and Dolphin Conservation, "Dolphin Drive Hunts," (2014),
<http://us.whales.org/issues/dolphin-drive-hunts> (diakses 24
November 2014).

Artikel atau Koran Online

Anonim. "Japan's hunts threaten some dolphins and whales with extinction, says EIA," The Guardian (2013)
<http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/31/japan-hunts-dolphins-whales-extinction> (diakses 17 Maret 2014).

Morton, Jamie. "NZ 'needs to do the right thing' to save Maui's dolphin," The New Zealand Herald, 10 Juni 2014,
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11271367 (diakses 18 Desember 2014).

Palmer, Mark J. "In Killing Whales and Dolphins, Japan Is Hurting Itself," Huffington Post, 16 Agustus 2014,
http://www.huffingtonpost.com/mark-j-palmer/in-killing-whales-and-dol_b_5501392.html (diakses 1 November 2014).

Rossiter, William. "Dolphin Hunts Illegal under International Law," A Publication of Cetacean Society International, winter 2012, Vol. XXI No. 1, Hal. 7-8.

Strand, Jonathan dan John P. Truman. "Japanese Foreign Aid to Microstates and Voting in the International Whaling Commission." Paper presented at the annual meeting of the ISA's 50th ANNUAL CONVENTION "EXPLORING THE PAST, ANTICIPATING THE FUTURE", New York Marriott Marquis, NEW YORK CITY, NY, USA, Feb 15, 2009.

Petisi

Kish, Evan. "Stop the slaughter of dolphins in Taiji, Japan." Petisi, 2014.
<https://www.change.org/en-CA/petitions/international-whaling-commission-stop-the-slaughter-of-dolphins-in-taiji-japan> (diakses 17 Maret 2014).

Karya Ilmiah / Tesis dan Disertasi

Iwasaki-Goodman, Masami. "Impacts of polarization in the IWC", PhD diss., University of Alberta, 1994.

Reimann, Kim. "Going Global: The Use of International Politics and Norms in Local Environmental Movements in Japan." Paper, Georgia State University, 2003,
<http://www.uky.edu/~ppkaran/conference/Going%20Global.pdf> (diakses 5 Oktober 2014).

Wouters, Judith. "Japan and the IWC: Investigating Japan's Whaling Policy Objectives." Master's Dissertation, Katholieke Universiteit Leuven, 2009.

Undang-Undang / Perjanjian Internasional

International Convention for the Regulation of Whaling, 1946.
Washington: International Whaling Commission.

United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS), 1982. Jamaica:
United Nations.

World Charter for Nature, 1982. United Nations.